

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dapat diartikan sebagai penjelasan secara rinci tentang apa yang akan dibahas oleh peneliti terkait dengan masalah penelitian. Dengan adanya kajian pustaka, maka akan mempermudah pembaca untuk dapat memahami kajian yang akan dibahas. Kajian pustaka ini akan membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan “Implementasi Kebijakan Adaptasi kebiasaan Baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat”

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hasil yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sekaligus sebagai perbandingan yang mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang satu jenis.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Hasil penelitian	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis
1	Dian Herdiana ,(2020)/ Jurnal	Implemetasi Kebijakan Pembatasan Sosial (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Virus DIASE	PSBB dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19	Kualitatif	Metode deskriptif	Penelitian ini menjelaskan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas.

10

11

2	Mario Walean (2020)/	Implementasi Kebijakan Penanganan	Pemerintah mengeluarkan kebijakan	Kualitatif	Metode deskriptif	Memahami fenomena implementasi
---	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	-------------------	--------------------------------

	Jurnal	COVID-19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.	berupa pembatasan aktivitas masyarakat.			kebijakan penanganan COVID-19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
3	Andreas Delpiero Roring (2021)/ Jurnal	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (COVID 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.	Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui kebijakan ekonomi maupun sosial. Bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19 di Desa Ongkaw 1	Kualitatif	Metode deskriptif	Penelitian ini menjelaskan adanya komunikasi antara lembaga terkait serta adanya dukungan sumberdaya yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah maupun partisipasi masyarakat desa.

Tabel 2.1 Peneliti (2022)

1) Pengertian Administrasi

Administrasi (*administration*) memiliki makna sebagai kegiatan manusia yang melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Istilah administrasi publik sesungguhnya merupakan perubahan paradigma dan makna dari administrasi negara, istilah tersebut seolah-olah hanya ditujukan untuk melayani negara, sedangkan administrasi publik memiliki makna yang lebih luas bukan hanya untuk melayani negara, tetapi juga swasta dan masyarakat.

Menurut **Pasalong (2007)** yang dikutip dalam buku Teori Administrasi Publik (**Revida et al., 2020:3**), “administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”. Sedangkan menurut **Ibrahim (2007)** “administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia”.

13

13

Dalam buku **Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Muhammad, 2019:22)**, mengemukakan tiga arti utama administrasi diantaranya :

1. Administrasi merupakan sistem pimpinan suatu organisasi bidang urusan atau usaha, merupakan fungsi utama administrator. Intinya adalah manajemen;

2. Administrasi merupakan sistem informasi untuk mengendalikan situasi, keadaan, atau organisasi. Inti dari administrasi sebagai sistem informasi pengendali keadaan adalah tata usaha
3. Administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih secara tertentu untuk menyelenggarakan tercapainya tujuan bersama yang tertentu pula. Intinya adalah *decisions making*.

Menurut Ulbert Silalahi (2013:5) yang dikutip oleh (Lina, 2019:17) dalam jurnal yang berjudul Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang maka dapat dikemukakan sebagai berikut.

“secara etimologis istilah administrasi berasal dari Bahasa Inggris ‘*administration*’ yang bentuk infinitifnya *to administer*. Dalam *Oxford Advanced learner’s Dictionary of Current English* (1974), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Kata administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelsmatigeverkrijging en verweking van gegeven* (tata usaha), *bestur* (manajemen dari kegiatan-kegiatan administrasi) dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti financial, personel, gudang)”.

14

13

Dengan demikian, administrasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat, catat mencatat, kearsipan dsb yang melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat terpenuhi.

2) Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik menurut **Shafritz dan Russel (1997:5-41)** mengemukakan bahwa **sulit memberitahu satu definisi administrasi publik yang dapat diterima oleh semua pihak.**

Oleh karena itu, keduanya memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu Politik, Ilegal atau Hukum.

- a. Berdasarkan kategori politik melihat administrasi publik sebagai “*what government does*” (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan.
- b. Berdasarkan kategori legal atau hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (*law in action*), sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari pengusaha atau “Raja” kepada rakyatnya, dan sebagian membentuk “Pengambilan paksa “ terhadap pihak-pihak yang kaya untuk dibagikan ke kalangan miskin, dimana pihak-pihak kaya merasa dirugikan harus tunduk dan mentaatinya.

15

- c. Berdasarkan kategori manajerial, administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain), sebagai *mickey mouse* yang dalam prakteknya merupakan bentuk “akal-akalan” untuk menghasilkan sesuatu dengan anggaran yang besar tetapi dengan hasil yang kecil, dan sebagai suatu seni.

Menurut **Stillman II (1991:6)**, bahwa definisi Administrasi negara sangat bervariasi bahkan sulit untuk disepakati. Sedangkan menurut Dimock and Dimock dan Fox, administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang di rencanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat atau konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan *business*, khususnya dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.

Rosenbloom memberikan batasan administasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandate pemerintahan di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi peraturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagaian. Definisi ini menekankan aspek proses *institutional* atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif,

legislatif.

Menurut (Muhammad, 2019:23), terdapat tiga arti utama administrasi negara yang berkaitan satu sama lain diantaranya : (1) administrasi negara bisa diartikan sebagai fungsi, administrasi negara merupakan fungsi dari setiap pejabat pemerintah, khususnya pejabat administrasi negara atau administrator negara pada semua tingkatan, eselon, atau tempat (posisi). (2) Administrasi negara bisa diartikan sebagai aparatur (*machinery*) atau sebagai aparat (*apparatus*) pemerintah. Sebagai aparatur dan aparat pemerintah, administrasi negara merupakan organisasi kompleks. (3) Administrasi negara bisa diartikan sebagai proses. Administrasi negara merupakan proses penyelenggaraan urusan-urusan negara dan pemerintah secara teknis, suatu proses yang tiada henti- hentinya (*never ending process*). Administrasi negara adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak menganal dimensi waktu demi mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.3 Kebijakan Publik

1) Pengertian Kebijakan Publik

David Easton dalam buku **Kebijakan Publik (Anggara, 2014:35)** mengemukakan bahwa **kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.**

Kebijakan publik menurut **Kraft & Furlong (2004:4)** dalam

Konferensi Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi (Nugroho, 2018:447) mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan pemerintah sebagai respons terhadap masalah sosial, yaitu kondisi publik yang memerlukan intervensi.

Chandler dan Plano (1988:14) mengemukakan bahwa pemanfaatan hal strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Kebijakan (*Policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang diterapkan. Rose 1969 (dalam buku Mukhlis Hamdi, 2014:36) mengartikan kebijakan (*Policy*) sebagai suatu rangkaian panjang dari suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Friedrich 1963:73) memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

18

tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang diatasi atau di manfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

Menurut **(Woll , Tangkilisan 2003:2)**, menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintahan untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang memperngaruhi kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik adalah pola tindakan yang diterapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara. Karakter utama dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk masalah publik. Setiap kebijakan publik akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya masyarakat untuk mencari pemecah masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Setiap kebijakan publik merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan.
3. Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif.

(Mukhlis Hamdi,2014)

Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan diharapkan dapat menjadi solusinya. Tujuan kebijakan publik yaitu mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (**Mustopadidjaja, 2002: 35**)

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan serta isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

20 Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui empat tahapan sebagai berikut :

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukandan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskan dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalu kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin dipalिकासikan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan
4. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dakam hubungan kuasal. Model dapat dibangun dalam bebagai bentuk, misalnya model skematik model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

2.1.4 Implementasi Kebijakan

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat manfaatnya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian

implementasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menurut Van Mater dan Van Horn (Agustiono, 2008)

mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan yang dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditunjukkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

2. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan

hasilnya), sedangkan menurut Hom dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or grup) that are achievement or abjective set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan

pemerintah). Jadi implemmentasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Impelemntasi merupakan cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya.

26

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.Sementara itu menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenaipengertian implementasi menyatakan bahwa:

“Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *“implementation”*, berasal dari kata kerja *“to implement”*, kata to implement berasal dari bahasa latin *“implementatum”* dari asal kata *“impere”* dimaksudkan *“to fill up”*, *“to fill in”* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *“plere”* maksudnya *“to fill”*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata *“to implement”* dimaksudkan sebagai: *“(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equipwith implement.*

Menurut Horn (Tahir,2014:55),”mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Kemudian menurut Jones (Sutujo, 2015:3),” implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done*”. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dpat menghitung apa yang dapat dikerjakan”.

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utamanya proses implementasi itu sendiri untuk member umpan baik pada pelaksanaan kebijakan dan juga mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

2.1.4.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini, dikarenakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan **Grindle** (1980) berpendapat bahwa implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan-tahapan pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa ; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan,

(William N. Duun,1999:hal 24).

Dari beberapa tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang peran yang sangat penting. Bahkan Udoji dengan tegas menyatakan bahwa "*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams of blue prints file jackets unless they are implemented*" artinya pelaksanaan kebijakan adalah suatu proses yang penting. Bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Solichin A. Wahab,1997:59).

Dalam konteks yang sama Sofian Effendi (2000) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan". Berarti tidak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu sendiri. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan.

Menurut Matland (Hamidi, 2014:98) “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (topdown) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up).

2.1.4.2 Faktor-faktor Yang Bekerja dalam Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Goggin et al. (1990:89), kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok :

- Isi kebijakan (*the content of the policy message*)
 - Format kebijakan (*the form of the policy message*)
 - Reputasi actor (*the reputation of the communicators*)
- Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsisten kebijakan (*policy consistency*), frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Sedangkan *reputation of communicator* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Rondinelli dan Cheema (1983:28) mendefinisikan empat faktor yang mempengaruhi kinerja implmentasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditiation*)
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)

- c. Sumber daya (*resources*)
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

Kemudian **Dwiyanto** dkk (2006:144-222) mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kewenangan diskresi, yaitu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku.
- b. Orientasi terhadap perubahan, menunjukkan sejauh mana kesediaan aparat birokrasi menerima perubahan.
- c. Budaya paternalism, merupakan system yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang lebih dominan.
- d. Etika pelayanan, dilihat dari apakah seorang aparat birokrasi dalam member pelayanan kepada masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak dari konsumen untuk mendapat pelayanan secara tranparan, efisien, dan adanya jaminan kepastian pelayanan.
- e. System insentif, berupa pemberian penghargaan materi maupun nonmateri kepada karyawan yang berperesentasi untuk mencapai hasil kerja yang di inginkan. Sedangkan bagi karyawan yang tidak berperesantasi diberikan disentif berbentuk teguran, peringatan, penunda/penurunan pagkat, atau pemecatan.
- f. Semangat kerja sama, dikonseptkan sebagai keterpaduan tim.

2.1.4.3 Dimensi-Dimensi Implementasi Kebijakan 7

Suatu pengimplementasian kebijakan merupakan tahapan penting sekaligus rumit dalam keseluruhan skema pengambilan kebijakan, karena memulai prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat terlihat apakah berhasil tercapai atau tidaknya tujuan.

Van Meter & Van Horn pun mengemukakan beberapa poin yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang dikutip oleh **Agustion** di dalam bukunya **Dasar-dasar**

Kebijakan Publik (2017:13) yang sama, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber Daya Kebijakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Van meter & Vam Horn yang dikutip oleh **Agustion** dalam buku yang sama menjelaskan tentang dimensi-dimensi dasar dan kebijakan publik, diantaranya :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, maksudnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan, maka agak sulit memang merealitisasikan kebijakan publik hingga untuk yang dapat dikatakan keberhasilan.

Sumber daya kebijakan, maksudnya keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu proses keberhasilan implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan keabilitas dari sumber daya itu rendah, maka keberhasilan kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana, maksudnya pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena keberhasilan kebijakan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.
4. Sikap Kecenderungan para Pelaksana, maksudnya sikap penerimaan atau sikap penolakan dari agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi setempat yang mengenal permasalahan yang dirasakan, melainkan dari para implementator pelaksana kebijakan “dari atas” (top down) yang tidak mengetahui permasalahannya.

5. Komunikasi antar Organisasi terkait, maksudnya koordinasi komunikasi sangat diperlukan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan- kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu juga sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, maksudnya sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan.

2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir merupakan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan pedoman penelitian yang mana disusun dalam pola pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang diteliti.

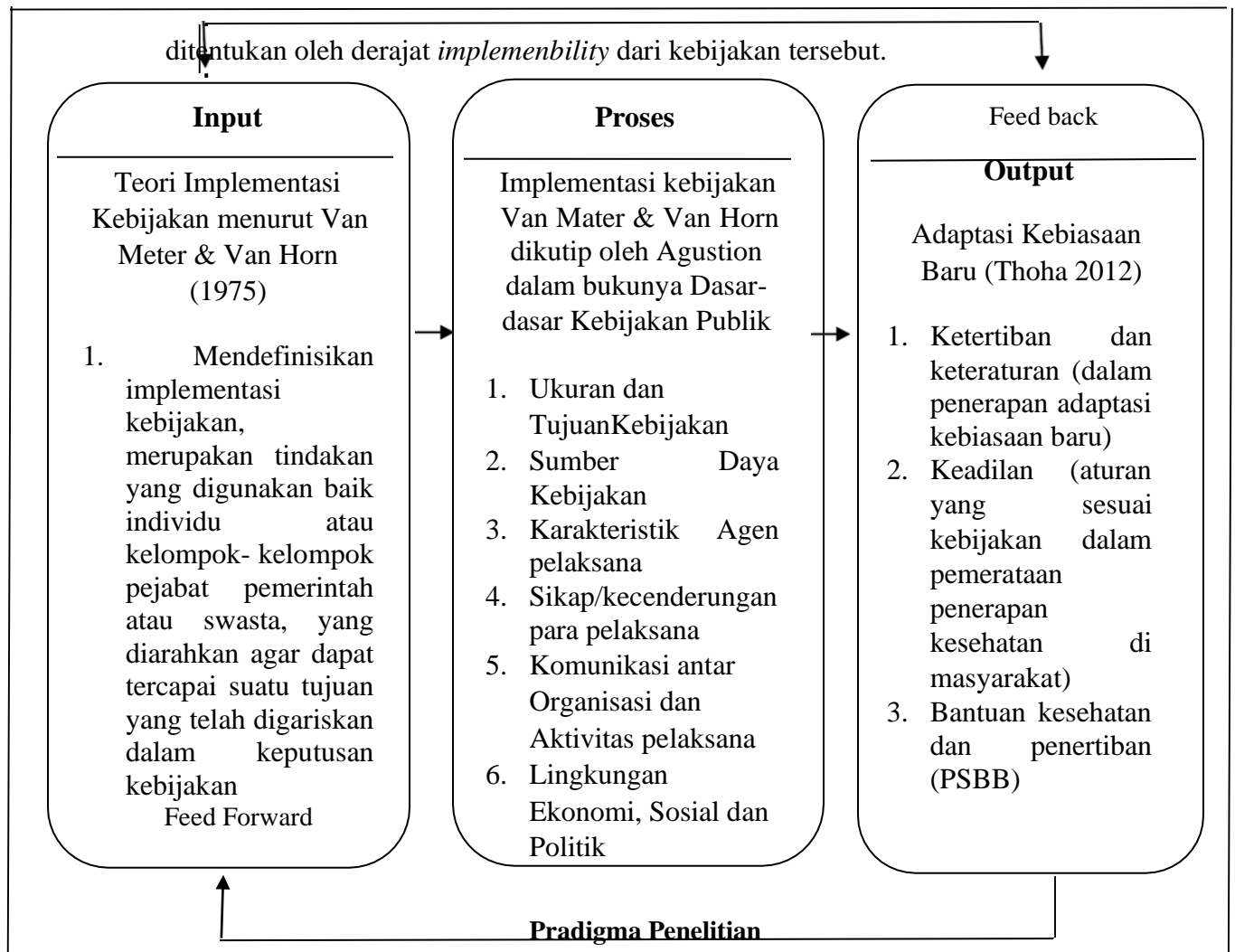
Berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Maka peneliti akan mengacu kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan fokus dan lokus dalam penelitian.

29

34

Serta sebagai dasar dan pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga akan menghasilkan

kesimpulan yang objektif. Serta juga peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk dijadikan sebagai landasan teori, dalil dan pendapat dari pakar yang berhubungan dengan variable yang menjadi kajian dalam peneliti. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan



39 Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

1. Isi kebijakan, meliputi:
 - a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang akandihasilkan.

- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - d. Kedudukan pembuatan kebijakan.
 - e. (siapa) pelaksanaan program.
2. Konteks implementasi, meliputi:
- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik lembaga dan penguasa
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap

Dari evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan mampu berjalan dengan efektif dan efisien.

2.3 Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian yang sangat penting dipahami oleh peneliti terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Berdasarkan konteks penelitian dan kerangka berpikir tersebut, proposisi dari **“Implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat”** dapat diuraikan sebagai berikut:

403

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :
 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

2. Sumber Daya Kebijakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan para pelaksana.
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

